

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior The Theory Of Planned Behavior*. 5978(August). [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arifin, Et Al. (2023). *Integritas : Jurnal Pengabdian Integritas : Jurnal Pengabdian*. 7(1), 129–143.
- Asmadi, I., Zahra, Hendry, Y., & Ratih, A. (2020). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Lenko Surya Perkasa Kator Pusat. *Jurnal Akrab Juara*, 5(2), 1–9.
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Makmur Auto Mandiri. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 404–411. <https://doi.org/10.32400/Gc.13.04.21173.2018>
- Budiman, N. A., Novi Antika, F., & Mulyani, S. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 15–28. <https://doi.org/10.37301/Jkaa.V16i1.32>
- Bunker, D. R. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib*. 1(1), 1–11.
- Damarwati, I., & Gunardi, G. (2022). Analisis Penerapan PPN Dan Pph Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Di Balai Jembatan Kementrian PUPR. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890–904. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i3.1469>
- Elisabeth, C. (2023). Analisis Layanan Pick Up Service O-Ranger Dalam Peningkatan Pendapatan Surat Dan Paket Logistik Pada Kantor Pos Pemeriksa Purworejo. *Jurnal Akuntansi*, 17(1).
- Fika, Armaya Hasibuan. (2023). *Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021 Skripsi Oleh : Fika Armaya Hasibuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Analisis Implementasi Ppn Dan Pph 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi*

Kasus Pada Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)

- Ghassani, N. (2017). *Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram) Skripsi Oleh : Nama : Nadhila Ghassani Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*
- Kasus, S., Pt, P., Prima, G., Sentul, U., Kartika, S., Riyadi, R., & Sipahutar, M. A. (2024). *Implementasi Perhitungan Tarif Bea Masuk , Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Barang Impor.* 4(2), 205–214. <https://doi.org/10.37641/Jabkes.V4i2.1904>
- Keuangan, P., & Stan, N. (2022). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa: Studi Empiris Pada Wilayah Kpp Pratama Klaten.* 39–47.
- Listyowati, Samrotun, Y., & Suhendra. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 244–248. <https://doi.org/10.51903/Kompak.V16i2.1260>
- Loupatty, L. G., Usmany, P., Feb, J. A., & Ambon, U. P. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Kewajiban Pembayaran Pajak Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat).* 3.
- Mejayan, D. I. K. (2023). *Potret Implementasi Pajak Dana Desa.* 4, 46–55.
- Mendey, A. (2009). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado. *Jurnal Emba*, 1(3), 99–109.
- Monalika, H. P. (2020). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus Di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung (The Effect Of Taxation Administration Reform To Tax Mandatory Compliance : Case Study In Tax Office Kedaton Bandar Lampung).* 1(2), 135–154.

- Permata, E., & Mangoting, Y. (2014). *Intervening*. 4(1), 1–14.
- Persyaratan, D. S., Gelar, M., Madya, A., & Perpajakan, P. S. D. (2023). *Oleh : MUH . ASRULLAH MUSLIM*.
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Pt. Novapharin. *Income*, 3(2), 58–71.
<https://doi.org/10.38156/Akuntansi.V3i2.151>
- Rifqi Ma'mun, M. (2023). *Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes) Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes)*.
- Sinaga, N. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157.
<https://doi.org/10.35968/Jh.V7i1.128>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention And Behavior: An Introduction To Theory And Research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
<https://people.umass.edu/aizen/F&A1975>.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset. hlm 20-23.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Geovernance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan* (Cet. 2). Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 39.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan/atau Kegiatan di Bidang Impor oleh Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan/atau PPh oleh Bendahara Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03/2022 Tentang Sanksi Administratif Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 Tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Mekanisme Pemungutan PPN dan PPh 22 oleh Instansi Pemerintah. <https://www.pajak.go.id>.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Dana Desa dan Transfer ke Daerah. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>.